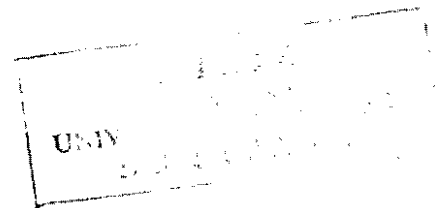


SKRIPSI

KK
Per 116/199
Ris
9

FEBRIAN RISNINDO

**GARANSI BANK DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN**



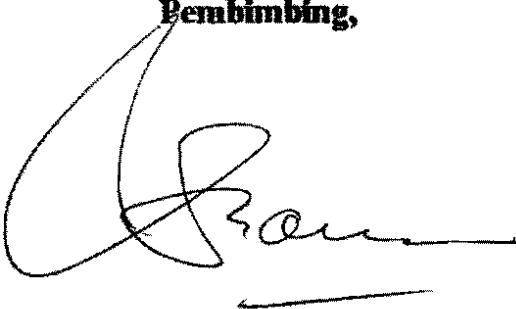
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**GARANSI BANK
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



DR. Moch. Isaeni, S.H., MS.
NIP. 130 604 270

Penyusun,



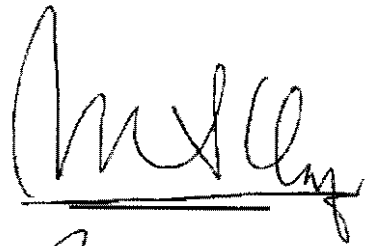
Febrian Rismindo
NIM. 039413938

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Telah diuji di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 29 Juli 1999.**

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., MS.



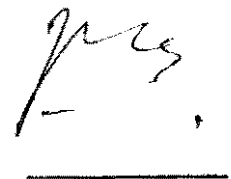
2. Anggota : - DR. Moch. Isnaeni, S.H., MS.



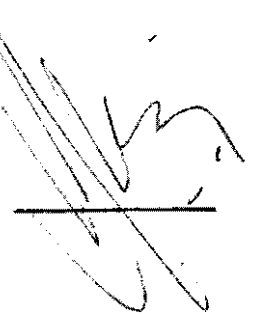
- Sri Handajani, S.H., M.Hum.



- Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



- Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dalam memberikan garansi bank bagi para nasabahnya, pihak bank terlebih dahulu akan menganalisa calon nasabah tersebut. Hasil dari analisis tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian garansi bank. Karena garansi bank termasuk dalam perjanjian penanggungan maka berdasarkan ketentuan BI sebagai bank sentral, perjanjian penanggungan harus dibuat secara tertulis. Tapi untuk menentukan perjanjian tersebut sah, hanya cukup ada kata sepakat diantara para pihak yang membuatnya dan tidak harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini ada dalam Pasal 1338 BW. Untuk meminimalkan risiko dalam memberikan suatu garansi bank, pihak perbankan mensyaratkan pula semacam pembayaran dari debitur yang digaranskannya pada bank berupa pembayaran yang disebut kontra garansi. Untuk itu didalam kegiatan perkreditan, bank harus mempunyai keyakinan bahwa dana yang disalurkan tersebut selain dapat membantu kegiatan usaha nasabah debitur juga pada akhirnya akan dapat kembali dengan selamat.
- b. Akibat krisis moneter yang berlangsung sejak bulan Juli 1997 maka sudah banyak bank-bank yang mendapatkan masalah mulai yang digolongkan kedalam BTO, BBO maupun BDL. Menghadapi krisis kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan nasional maka pemerintah berupaya membangun kembali sistem perbankan yang sehat dengan cara memberikan jaminan penuh kepada seluruh nasabah deposan dan kreditur bank-bank umum nasional. Dengan demikian para nasabah tidak perlu khawatir bila ingin mengadakan suatu kegiatan (bisnis) dengan menggunakan jasa perbankan.

2. SARAN

- a. Lembaga garansi bank cukup penting peranannya dalam rangka menunjang kegiatan usaha yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih (selektif), dalam arti bahwa pemberian garansi bank ini seyogyanya diarahkan pada bidang usaha yang memang potensial untuk berkembang dan layak mendapat bantuan dari bank. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penggunaan lembaga garansi bank yaitu:
 - Perlunya keterlibatan secara langsung para pihak dalam garansi bank akan mengurangi risiko dikemudian hari, meskipun kemungkinan ini dipandang tidak efisien, namun sebenarnya perlu lebih memberikan jaminan kepastian hukum.
 - Pengikatan jaminan/ agunan baik jaminan/ agunan pokok yang merupakan kontra garansi maupun jaminan tambahan dengan pengikatan juridik yang kuat akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi bank.

- b. Pada saat ini (reformasi sistem perbankan) sudah waktunya BI melakukan transparansi mengenai hal-hal yang menyangkut pembinaan dan pengawasan bank-bank. Karena telah ada jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank-bank umum. Mengenai pembentukan BPPN seyogyanya BI juga ikut bekerja mendampingi BPPN. Karena menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tugas pembinaan dan pengawasan bank yang menjadi tanggung jawab BI itu tidaklah hanya terbatas kepada bank-bank yang sehat saja, tetapi juga terhadap bank-bank yang tidak sehat.